

Perancangan Arsitektur Enterprise Sebagai Peningkatan Proses Pencatatan Sipil Menggunakan TOGAF 9.2

Hilal Arqaan Pratama*¹, Asti Amalia Nur Fajrillah², Widyatasya Agustika Nurtrisha³

^{1,2,3} Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, Bandung; Jl. Telekomunikasi No.1, (022)7564108

e-mail: *¹ilaltkm@student.telkomuniversity.ac.id, ²astiamalia@telkomuniversity.ac.id, ³widyatasya@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan umum diketahui sebagai e-Government sedang gencar dilaksanakan guna mendukung percepatan teknologi digital pada pemerintahan daerah. Pengembangan SPBE bertujuan guna merancang jaringan informasi terhadap layanan publik, salah satunya adalah peningkatan pelayanan administrasi pencatatan sipil untuk mewujudkan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan meningkatkan indeks nilai SPBE. Salah satu penyelenggaraan SPBE merujuk dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 adalah SPBE Nasional yang tersusun oleh domain arsitektur keamanan SPBE, domain arsitektur data serta informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur proses bisnis. Perancangan SPBE ini dilakukan dengan menerapkan framework TOGAF ADM 9.2 yang tersusun atas 7 (tujuh) fase untuk menghasilkan blueprint Enterprise Architecture. Output yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu Blueprint Enterprise Architecture yang bisa diaplikasikan sebagai pedoman atau rencana strategis dalam pengembangan enterprise architecture.

Kata kunci—Enterprise Architecture, TOGAF, e-Government, SPBE

ABSTRACT. e-Government is being actively implemented to support the acceleration of digital technology in local governments. The purpose of developing e-Government is to establish an information network for public services, one of which is the improvement of civil registration administrative services to fulfill the third mission of the Central Lombok District Government and enhance the e-Government index value. One of the implementations of e-Government, based on Presidential Regulation No. 18 of 2020 concerning the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024, is the National e-Government. The National e-Government has an Architecture Domain consisting of the business process architecture domain, e-Government security architecture domain, e-Government application architecture domain, e-Government infrastructure architecture domain, e-Government service architecture domain, also data and information architecture domain. The e-Government design carried out using the seven phases in TOGAF ADM 9.2 framework in order to produce an Enterprise Architecture blueprint. The output from this research is the Blueprint Enterprise Architecture that can be utilized as a guideline or strategic plan for enterprise architecture development.

Keywords: Enterprise Architecture, TOGAF, e-Government, SPBE

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi kian berkembang secara signifikan tidak hanya di kalangan perusahaan saja, namun teknologi informasi ini juga berkembang pesat di kalangan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau umum diketahui dengan *e-Government* menjadi satu dari sekian bentuk konsep pemanfaatan teknologi informasi yang dijalankan oleh pemerintahan. Penerapan SPBE juga dapat diartikan sebagai bentuk komitmen guna meningkatkan kekuatan kemitraan pemerintah dengan warga negara dan sektor publik (Arief, & Yunus Abbas, 2021). Untuk mendukung percepatan teknologi digital, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan pengembangan SPBE yakni menciptakan jaringan informasi atas layanan publik, membangun hubungan yang interaktif guna memacu perekonomian nasional, sekaligus menghadirkan sistem manajemen bersifat akuntabel, transparan, efektif, dan efisien guna menunjang kualitas pelayanan publik agar kian meningkat (Supriyanto et al., 2021). Selain itu, SPBE juga berarti memanfaatkan teknologi digital untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam pelayanan publik untuk menciptakan customer online (Alhari, Febriyani, et al., 2022), (Irawan, 2015).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 memaparkan bila pemerintah memerlukan percepatan pemanfaatan teknologi digital, salah satu yang digunakan oleh pemerintah adalah SPBE Nasional. SPBE Nasional memiliki Domain Arsitektur yang tersusun atas domain arsitektur keamanan SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur data

dan informasi, domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur layanan SPBE (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 2020). Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 dirujuk dalam penilaian taraf kematangan SPBE dimana memuat struktur penilaian kematangan SPBE yang tersusun atas aspek (penilaian area spesifik implementasi SPBE), domain (penilaian area implementasi SPBE), serta Indikator (penilaian informasi detail atas aspek implementasi SPBE) (Dewi et al., 2022). Tata Kelola SPBE berperan sebagai konsep kerja yang menjamin pelaksanaan terkait aturan, arahan serta tata kendali dalam implementasi SPBE yang terpadu (Indonesian Presidential Regulation Number 95 of 2018 Concerning Electronic-Based Government Systems, 2018).(Alhari et al., 2023).

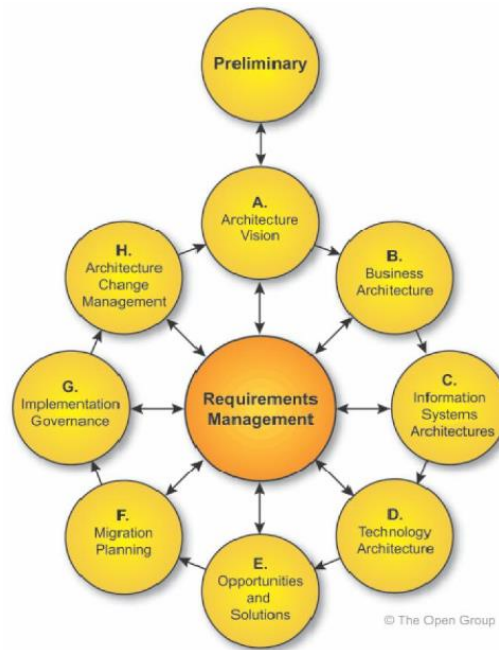
Seluruh domain yang ada pada SPBE mengacu pada salah satu komponen utama yaitu Arsitektur SPBE untuk mengintegrasikan semua domain yang ada. Mengacu pada urgensi penerapan SBPE pada proses pelayanan pemerintahan berbasis elektronik, daerah yang telah mengimplementasikan SPBE salah satunya yakni Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dengan indeks ketercapaian SPBE terdapat pada angka 2,37 dengan kategori Cukup (Penyusun, 2021). Ketercapaian nilai tersebut tidak lepas dari beberapa isu internal yang menyertainya khususnya dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah (Disdukcapil Lombok Tengah), yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur masih belum mumpuni, sarana serta prasarana pelayanan yang kurang memadai, keterbatasan akses data oleh masyarakat, dan minimnya taraf kesadaran masyarakat terhadap urgensi dokumen kependudukan. Isu tersebut diperkuat oleh beberapa hal yang menjadi penghambat ketercapaian nilai SPBE pada bidang administrasi kependudukan yaitu belum tercapainya tingkat kepemilikan dokumen akta kelahiran dan pelayanan adminduk online mengenai pencatatan sipil.

Menurut survei PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2022 Indonesia mendapatkan peringkat 77 dari 193 negara dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE dimana terdapat kenaikan 11 peringkat dari tahun 2020 yang berada di urutan 107 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022). Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya peningkatan pelayanan administrasi pencatatan sipil untuk mewujudkan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yakni “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih” serta meningkatkan indeks nilai SPBE Kabupaten Lombok Tengah. Temuan yang dihasilkan dari riset ini yaitu pengaplikasian *framework* TOGAF ADM guna perancangan *Blueprint Enterprise Architecture* SPBE dengan berdasarkan domain data dan informasi, domain proses bisnis, domain aplikasi, domain layanan serta domain teknologi untuk menunjang Disdukcapil Lombok Tengah perihal peningkatan proses pencatatan sipil (Alhari, Witarsyah, et al., 2022).

METODE PENELITIAN

TOGAF ADM

TOGAF, yang juga dikenal sebagai kerangka kerja Arsitektur *The Open Group*, berupa sesuatu konstruksi arsitektur yang mencakup secara komprehensif dalam merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengelola arsitektur perusahaan. TOGAF merupakan salah satu dari tiga kerangka kerja yang paling sering digunakan dalam perancangan arsitektur dan memiliki pendekatan yang menyeluruh (holistic) (Safitri & Pramudita, 2017). Berikut sejumlah fase yang dimuat pada TOGAF ADM.



Gambar 1. Framework TOGAF 9.2

Dalam perancangan ini memakai beberapa fase yakni fase *Preliminary*, fase *Architecture Vision*, fase *Business Architecture*, fase *Information Systems Architecture*. fase *Technology Architecture*.

Analisis dan Perancangan Artefak

Enterprise Architecture digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi TI, mengurangi biaya dan risiko, meningkatkan kepuasan manajemen dan mempersingkat waktu pengembangan (Ilham et al., 2022), (Kotusev, 2017). Dalam pengembangan *Enterprise Architecture* organisasi atau perusahaan perlu mengadopsi dan mengembangkan *framework* sendiri sebagaimana yang dibutuhkan oleh organisasi maupun perusahaan. *Framework* yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu *The Open Group Architecture Framework (TOGAF) ADM 9.2* yang berupa 7 (tujuh) fase. TOGAF termasuk ke dalam tiga *framework* yang paling sering digunakan dalam perancangan arsitektur dan memiliki pendekatan yang menyeluruh (*holistic*) (Safitri & Pramudita, 2017).

Tabel 1. Analisis dan Perancangan Artefak

Fase Arsitektur EA pada Penelitian	Fase TOGAF ADM
<i>Preliminary Phase</i>	<i>Preliminary Phase</i>
<i>Architecture Vision</i>	<i>Phase A: Architecture Vision</i>
Arsitektur Proses Bisnis	<i>Phase B: Business Architecture</i>
Arsitektur Layanan	<i>Phase A: Architecture Vision</i> <i>Phase B: Business Architecture</i>
Arsitektur Data dan Informasi	<i>Phase C: Information System Architecture – Data Architecture</i>
Arsitektur Aplikasi	<i>Phase C: Information System Architecture – Application Architecture</i>
Arsitektur Teknologi	<i>Phase D: Technology Architecture</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Preliminary Phase*

Tahap pertama perancangan *Arsitektur Enterprise* disebut fase *Preliminary*. Fase ini memulai proses inisiasi serta persiapan untuk menerapkan sebuah arsitektur *enterprise* sebagaimana yang dibutuhkan oleh bisnis organisasi. Salah satu hasil yang diperoleh dari tahap ini yaitu *Principles Catalog*. *Principles Catalog* berfungsi guna menentukan jenis prinsip bisnis yang bisa digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan

arsitektur organisasi yang tepat. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam katalog harus memenuhi kebutuhan organisasi dalam melangsungkan proses bisnis sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan(The Open Group, 2009).

Tabel 2. *Principle Catalog*

Domain	Rasional	Implikasi
Bisnis	Manajemen informasi dalam layanan yang ada pada Disdukcapil bisa diakses dengan cepat dan mudah oleh semua pihak terkait serta mematuhi prinsip-prinsip TI sehingga perbaikan proses bisnis dapat berjalan lancar.	Untuk menjalankan aktivitas bisnisnya Disdukcapil harus berhati-hati dalam mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan eksternal serta menerapkan manajemen risiko.
Data dan Informasi	Data yang dimiliki merupakan asset penting yang mudah diakses, terjamin keamanan dan keakuratan data, serta memiliki keamanan data yang baik.	Seluruh pihak yang ada pada Disdukcapil perlu memahami data yang digunakan dan mendapatkan kemudahan dalam mengakses data-data yang tersedia.
Aplikasi	Aplikasi yang digunakan bersifat independent dan mudah digunakan oleh seluruh stakeholder sehingga dapat membantu keberlangsungan proses bisnis.	Aplikasi yang dikembangkan bisa diaplikasikan secara mudah baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Layanan	Setiap individu atau entitas yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan, mencakup pengguna layanan dapat secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas proses bisnis yang ada.	Layanan yang tersedia dapat melihat berbagai sudut pandang untuk memberikan pelayanan yang optimal, bersifat terbuka kepada semua pihak, dapat bertahan dalam jangka panjang, dan meningkatkan kualitas bisnis pada Disdukcapil.
Infrastruktur (Teknologi)	Teknologi yang diterapkan pada proses bisnis Disdukcapil memiliki standar sesuai dengan kesepakatan antar stakeholder dan memiliki system back up serta keamanan data yang baik.	Perlu dilakukan peninjauan terhadap teknologi yang digunakan secara berkala dan terdapat system back up dan melakukan transfer data dan aplikasi menggunakan VPN atau LAN.

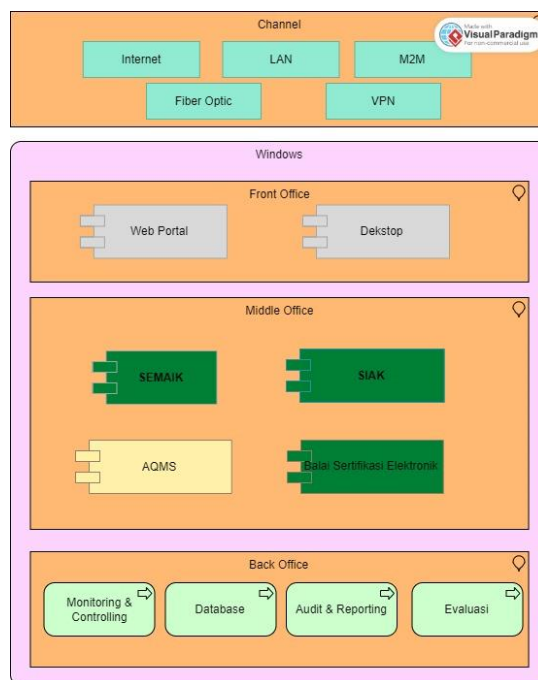
2. *Architecture Vision*

Fase awal dalam ADM yakni fase *Architecture Vision* ditujukan guna mendefinisikan cakupan atau jangkauan, *stakeholder* terkait agar perancangan EA yang hendak diimplementasikan dapat memperoleh persetujuan pihak organisasi. *Output* yang dihasilkan dari fase ini berupa *Solution Concept Diagram* serta *Value Chain Diagram*. Berikut merupakan Tabel *Value Chain* dan *Solution Concept Diagram*.

Tabel 3. *Value Chain*

Secondary Activities	Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Peraturan Perundang – Undangan
	Human Resources	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan SDM Harmonisasi Manajemen Antar Pegawai Pencanaan Keuangan
	Technology Development	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi
	Procurement	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana

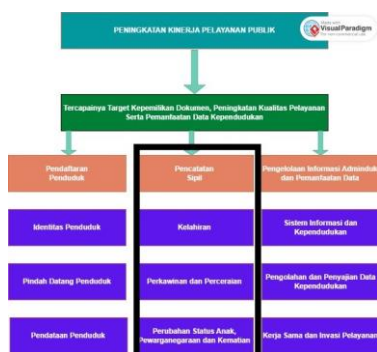
<i>Primary Activities</i>	Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Penduduk • Pindah Datang Penduduk • Identitas Penduduk
	Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan Perkawinan dan Perceraian • Penerbitan Akta Kelahiran • Pencatatan Perubahan Status, Pewarganegaraan serta Kematian
	Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan • Sistem Informasi Administrasi Kependudukan • Kerjasama dan Invasi Dalam Pelayanan



Gambar 2. Solution Concept Diagram

3. Arsitektur Proses Bisnis

Fase yang ketiga merupakan fase Arsitektur Proses Bisnis. Pada fase ini menjelaskan tata kelola, proses bisnis utama, organisasi, strategi bisnis dalam sebuah organisasi. Pada fase Arsitektur Proses Bisnis, penelitian ini berlandaskan pada Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dalam PermenPAN RB Nomor 19 Tahun 2018(Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2018) sebagai pedoman pembuatan peta Proses Bisnis pada perancangan *Enterprise Architecture* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.



Gambar 3. Peta Proses Bisnis

4. Arsitektur Layanan

Arsitektur Layanan merupakan arsitektur yang menjelaskan mengenai perancangan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi terkait penyediaan dan penggunaan layanan secara menyeluruh. Layanan pada SPBE dikategorikan dalam dua jenis yakni layanan publik dengan basis elektronik serta layanan administrasi pemerintahan dengan basis elektronik yang tertampung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018(Kementerian Sekretariat Negara, 2018) terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Output yang diperoleh dari fase ini yaitu Katalog Layanan.

Katalog layanan memuat layanan yang ada pada DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Layanan DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah diambil dari program Pencatatan Sipil atau Peta Proses Bisnis Level 0. Layanan yang dipakai pada DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah merupakan jenis layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang dimuat oleh Undang – Undang No. 23 Tahun 2014(Pemerintah Republik Indonesia, 2014) mengenai Pemerintah daerah. Tabel berikut adalah Katalog Layanan Program Pencatatan Sipil pada Bidang Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kabupaten Lombok Tengah.

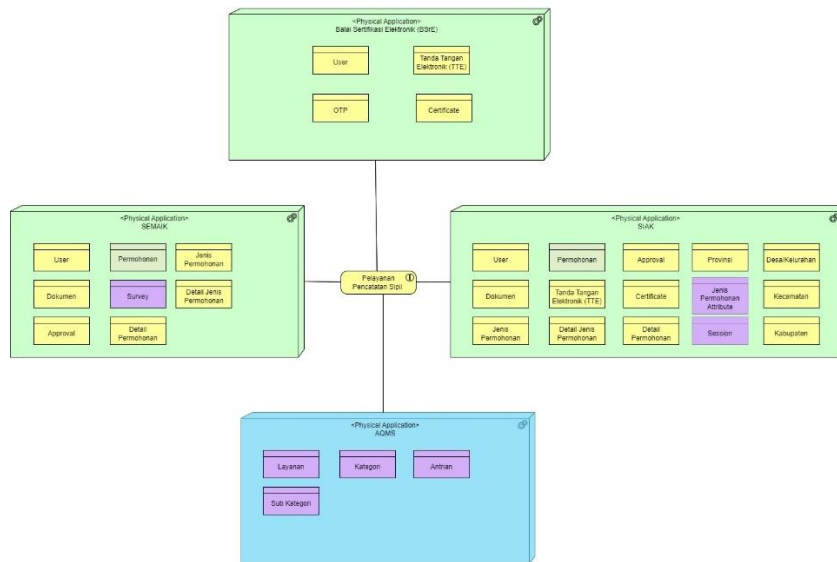
Tabel 4. Katalog Layanan

Unit Kerja/Fungsi	Proses Bisnis	Layanan
Kelahiran	DPS 01.01.01 Pelayanan Akta Kelahiran <i>Offline</i>	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil <i>Offline</i>
	DPS 01.01.02 Koordinasi Lintas Sektoral/Wilayah	Pelayanan Koordinasi Lintas Sektoral/Wilayah
	DPS 01.01.03 Pelayanan Keliling Akta Kelahiran	Pelayanan Keliling Dokumen Pencatatan Sipil
	DPS 01.01.04 Pelayanan Terintegrasi dengan Instansi Lain Akta Lahir	Pelayanan Terintegrasi dengan instansi Lain
	DPS 01.01.05 Pelayanan Akta Kelahiran <i>Online</i>	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil <i>Online</i>
Perkawinan dan Perceraian	DPS 01.02.01 Pelayanan Akta Perceraian	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil <i>Offline</i>
	DPS 01.02.02 Pelayanan Akta Perkawinan	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil <i>Offline</i>
	DPS 01.02.03 Pelayanan Berita Acara Perkawinan dan Perceraian	Pelayanan Berita Acara Perkawinan dan Perceraian
	DPS 01.02.04 Pelayanan Keliling Perkawinan dan Perceraian	Pelayanan Keliling Dokumen Pencatatan Sipil
	DPS 01.02.05 Pelayanan Terintegrasi dengan Instansi Lain Perkawinan dan Perceraian	Pelayanan Terintegrasi dengan instansi Lain
Perubahan Status, Kewarganegaraan dan Kematian	DPS 01.03.01 Pelayanan Akta Kematian <i>Offline</i>	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil <i>Offline</i>
	DPS 01.03.02 Pelayanan Akta Pengakuan Anak	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil <i>Offline</i>

	DPS 01.03.03 Kewarganegaraan	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil <i>Offline</i>
	DPS 01.03.04 Pengelolaan Buku Pokok Kematian	Pelayanan Pengelolaan Buku Pokok Kematian
	DPS 01.03.05 Pelayanan Keliling Perubahan Status, Kewarganegaraan dan Kematian	Pelayanan Keliling Dokumen Pencatatan Sipil
	DPS 01.03.06 Pelayanan Terintegrasi dengan Instansi Lain Perubahan Status, Kewarganegaraan dan Kematian	Pelayanan Terintegrasi dengan instansi Lain
	DPS 01.03.07 Pelayanan Akta Kematian <i>Online</i>	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil <i>Online</i>

5. Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur data dan informasi bertujuan guna pemetaan kebutuhan data organisasi yang hendak diteruskan menjadi rancangan model data. Model data yang dikonsepsikan akan menunjang pengintegrasian data, pengontrolan aset data, serta penyelarasan data melalui implementasi strategi bisnis organisasi. Output yang didapatkan dari fase ini yaitu Data Dissemination Diagram. Berikut merupakan Data Dissemination Diagram pada Dinas Dukcapil Kabupaen Lombok Tengah.



Gambar 4. Data Dissemination Diagram

6. Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Aplikasi melibatkan penentuan dan penjelasan tentang aplikasi yang dijalankan, sekaligus cara interaksi antar aplikasi guna mengolah data sebagaimana yang dibutuhkan oleh bisnis organisasi. Hasil output dalam fase ini berupa Katalog Aplikasi. Katalog Aplikasi melakukan pendeskripsian atas aplikasi yang dijalankan DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah untuk membantu proses bisnis layanan dan kegiatan yang terdapat dalam Bidang Pencatatan Sipil. Tabel berikut merupakan Katalog Aplikasi Bidang Pencatatan Sipil DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah.

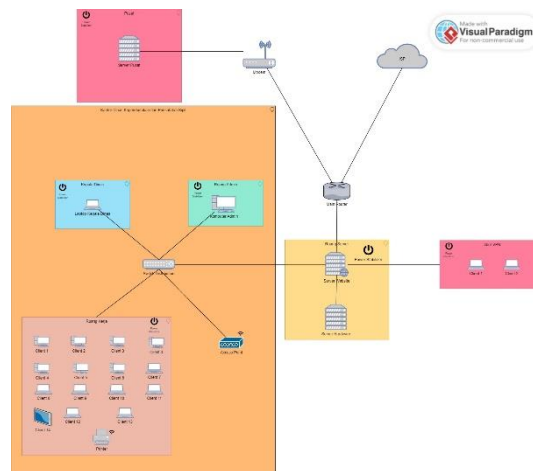
Tabel 5. Katalog Aplikasi

Nama Aplikasi	Deskripsi Aplikasi	Penyedia Aplikasi	Unit Kerja Terkait
SIK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Aplikasi yang digunakan dalam memfasilitasi berbagai proses administrasi kependudukan seperti pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Berbagai informasi yang dihasilkan dari aplikasi tersebut	Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI)	Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah

	antara lain Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan sejenisnya.		
SEMAIK	Web aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pengajuan persyaratan penerbitan dokumen administrasi kependudukan.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah	Bidang Pencatatan Sipil DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah
AQMS (<i>Automation Queue Management System</i>)	Mesin antri otomatis agar penduduk lebih nyaman dan aman dalam mengantri.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah	Bidang Pencatatan Sipil DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah
Balai Sertifikasi Elektronik (PSrE) (PSrE)	Berfungsi untuk pemberian Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Bidang Pencatatan Sipil DisDukcapil Kabupaten Lombok Tengah

7. Arsitektur Teknologi

Fase Arsitektur Teknologi membahas mengenai infrastruktur teknologi yang akan memenuhi *Standard Data Architecture* serta menunjang *Application Architecture*(Aywandari et al., 2021). Output yang diperoleh dari fase ini adalah *Environment and Location Diagram* yang merupakan penggambaran dimana lokasi penggunaan teknologi dan aplikasi itu berada. Pada tahap ini menggambarkan keterkaitan antara teknologi dan aplikasi. Berikut merupakan *Environment and Location Diagram* pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah.



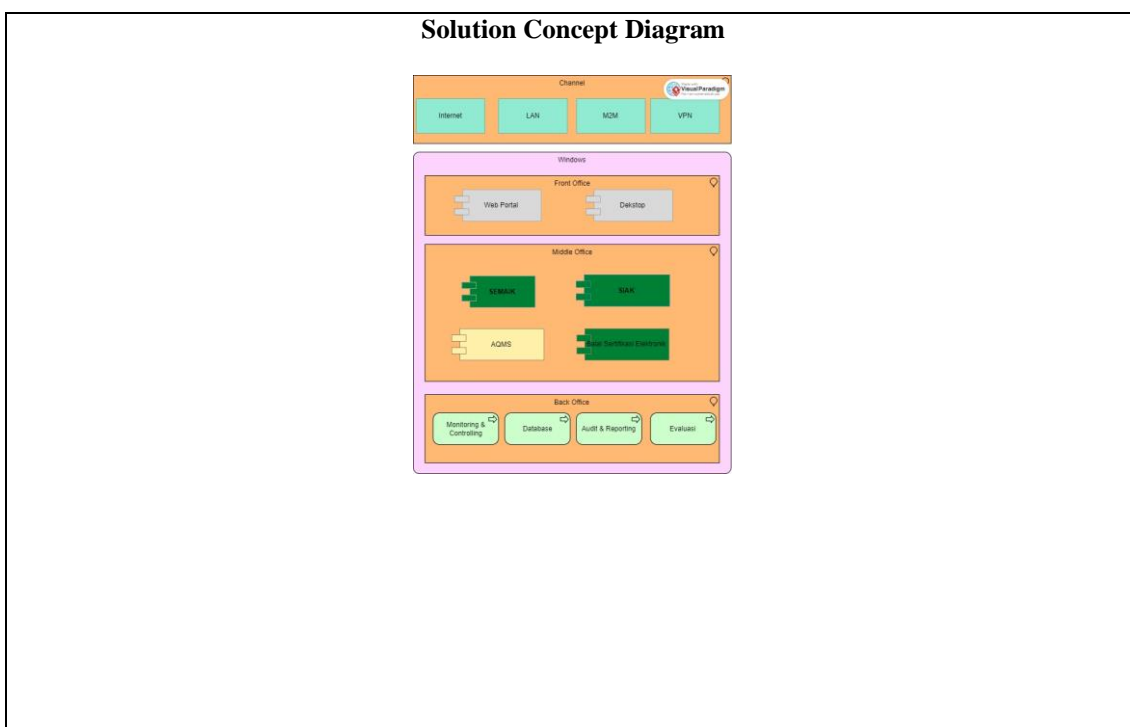
Gambar 5. *Environment and Location Diagram*

8. Output Perancangan Enterprise Architecture

Blueprint Enterprise Architecture merupakan output pada penelitian ini yang berfungsi untuk memetakan perencanaan transformasi oleh Disdukcapil Lombok Tengah. Rencana perubahan bisnis dan teknologi yang dilakukan bertujuan untuk mencapai rencana strategis jangka panjang organisasi. Berikut ini merupakan pemetaan *blueprint Enterprise Architecture* yang dijalankan.

Tabel 6. Blueprint Enterprise Architecture

BLUEPRINT ENTERPRISE ARCHITECTURE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TENGAH	
<p>Ruang Lingkup Bidang Pencatatan Sipil</p>	<p style="text-align: center;">Arahan Strategi Organisasi</p> <p>Visi: “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)”</p> <p>Misi: “Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mudah, Cepat dan Bersih”</p>
<p>Domain Arsitektur Bisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan Peta Relasi • Perancangan Peta Proses Bisnis Level 0,1, dan 2 • <i>Redesign</i> proses bisnis level 2 	<p style="text-align: center;">Dokumen Arahan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 • Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 • Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 • Rencana Strategi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 • RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026
<p>Domain Arsitektur Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perancangan layanan pada Bidang Pencatatan Sipil 	<p style="text-align: center;">Domain Arsitektur Data dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Entitas Data dengan Proses Bisnis dan Aplikasi • Perancangan Model Konseptual Data • Perancangan Model Diseminasi Data
<p>Domain Arsitektur Aplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi fungsi aplikasi yang berkorelasi dengan proses bisnis dan entitas data organisasi • Mengimprove aplikasi yang sudah ada • Penambahan aplikasi baru sesuai dengan 	<p style="text-align: center;">Domain Arsitektur Infrastruktur (Teknologi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi teknologi standar yang digunakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. • Mengidentifikasi teknologi yang berkaitan pada aplikasi yang digunakan. • Perancangan Environment and Location Diagram • Perancangan Platform Decomposition Diagram



PENUTUP

Hasil penelitian perancangan *Enterprise Architecture* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghasilkan *blueprint Enterprise Architecture* yang dikonsepsikan dengan *framework* TOGAF ADM sebagai kerangka kerja penyusunan perancangan *Enterprise Architecture* yang berupa fase *Preliminary Phase*, *Arsitektur Bisnis*, *Arsitektur Data dan Informasi*, *Arsitektur Aplikasi*, *Architecture Vision*, *Arsitektur Layanan*, serta *Arsitektur Teknologi*.

Perancangan *Enterprise Architecture* ini juga berlandaskan pada PermenPAN RB No. 59 Tahun 2020 guna melakukan pengukuran terhadap capaian kemajuan implementasi SPBE dan memacu peningkatan kualitas implementasi SPBE dan pelayanan publik dalam Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. *Blueprint* yang dihasilkan pada perancangan *Enterprise Architecture* ini dapat digunakan sebagai acuan solusi perbaikan pelayanan publik dan meningkatkan indeks ketercapaian SPBE pada Disdukcapil Lombok Tengah.

DAFTAR RUJUKAN

Alhari, M. I., Febriyani, W., & Fajrillah, A. A. N. (2022). Meta-Analysis and Systematic Review: A Strategy and Dimension to Achieve of Smart Village Concept. *4th International Conference on Smart Sensors and Application: Digitalization for Societal Well-Being, ICSSA 2022*, 90–95. <https://doi.org/10.1109/ICSSA54161.2022.9870963>

Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>

Aywandari, T. L., Fajar, S., Gumilang, S., & Nugraha, R. A. (2021). *Enterprise Architecture Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pada Domain Infrastruktur Di Lingkungan Kabupaten Kuningan Enterprise Architecture of Electronic-Based Government System in Infrastructure Domain in the Regional Government of Kuningan*. 8(5), 9107–9113.

Dewi, R. S., Astiarasanti, A. H., & Fahmi, F. Z. (2022). Pemantauan dan Evaluasi Teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. *Journal of Digital Business and Innovation Management*, 1(1), 56–68. <https://doi.org/10.1234/jdbim.v1i1.48676>

Ilham, M., Amalia, A., & Fajrillah, N. (2022). *Enterprise Architecture : A Strategy to Achieve e-Government Dimension of Smart Village Using TOGAF ADM 9 . 2*. 6(August), 540–545.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (2020).

- Irawan, B. (2015). E-Government sebagai Bentuk Baru dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 200–209.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Indonesia Naik 11 Peringkat Hasil Survey e-Government PBB*.
- Alhari, M. I., Nur Fajrillah, A. A., & Lubis, M. (2023). *Business Value Assessment and IT Roadmap to Achieve e-Government Dimension of Smart Village using TOGAF ADM: A Case Study of Regency in Indonesia. March 2023*, 29–34. <https://doi.org/10.1109/icitisee57756.2022.10057674>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*, 1–17.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- Kotusev, S. (2017). Eight Essential Enterprise Architecture Artifacts. *British Computer Society (BCS), February*, 1–5.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*.
- Indonesian Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems, Media Hukum 110 (2018).
- Penyusun, T. (2021). *Laporan Hasil Evaluasi Fase I*.
- Safitri, N., & Pramudita, R. (2017). Pengembangan Kerangka Kerja Arsitektur Enterprise. *Bina Insani Ict Journal*, 4(1), 73–82.
- Supriyanto, S., Ridwan, A., Tamam, R., Santoso, M. I., Satria, D., & Mutaqin, A. I. S. (2021). Perancangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang Berkelanjutan di Provinsi Banten. *Journal Industrial Servicess*, 7(1), 171. <https://doi.org/10.36055/12952>
- The Open Group. (2009). *TOGAF Standard, Version 9.2, a Standard of The Open Group*.
- Alhari, M. I., Witarasyah, D., Nugraha, R. A., Nuraliza, H., Azzahra, S. F., & Rismadewi, K. A. (2022). Developing IT Strategic Transformation of Smart Village Concept for Indonesian Village Model. *Proceedings - International Conference Advancement in Data Science, E-Learning and Information Systems, ICADEIS 2022, November*. <https://doi.org/10.1109/ICADEIS56544.2022.10037570>